



EVALUASI KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN DI KELURAHAN BANDARJO KABUPATEN SEMARANG

Dina Puspita¹ dan Djoko Suwandono²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : dina_puspita@yahoo.co.id

Abstrak: Perkembangan suatu kota, diiringi pula dengan peningkatan aktivitas masyarakatnya. Peningkatan aktivitas masyarakat menimbulkan perubahan-perubahan fisik lingkungan yang secara tidak sadar dapat meningkatkan permasalahan yang ada di perkotaan. Salah satu permasalahan yang dapat timbul adalah masalah permukiman. Permukiman yang baik, dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada, dan pemerintah telah menerbitkan peraturan standar sarana dan prasarana permukiman. Di Indonesia kita dapat dengan mudah menemukan permukiman yang tidak atau kurang layak. Salah satu dari permukiman tersebut adalah permukiman Bandarjo, yang memiliki bentuk yang cukup berantakan serta kotor. Melalui kondisi tersebut kita dapat mengobservasi mengenai ketersediaan sarana dan prasarana berdasar standar yaitu menggunakan Peraturan Kementrian Sarana dan Prasarana no 534/2001 mengenai standar pelayanan minimum serata menggunakan persepsi penghuni. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan apakah prasarana (jalan, drainase, sanitasi, air bersih dan persampahan) dan sarana (pendidikan, kesehatan, perdagangan, sosial budaya dan ruang terbuka hijau) di permukiman Kelurahan Bandarjo telah memadai atau tidak. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis karakteristik sosial ekonomi, analisis ketersediaan sarana prasarana berdasarkan standar dan analisis sarana prasarana berdasarkan persepsi penghuni. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, penyebaran kuisisioner, dan telaah dokumen. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah tingkat ketersediaan sarana prasarana di Kelurahan Bandarjo yang telah memadai kecuali persampahan dan ruang terbuka hijau.

Kata kunci: Permukiman, sarana prasarana

Abstract: The development of a city, accompanied by an increase in the activity of the community. Increased community activities cause physical changes in the environment that can unconsciously improve the existing problems in urban areas. One of the problems that can arise is the issue of settlements. Good settlement, can be seen from the existing facilities and infrastructure, and the government has issued a regulation settlements infrastructure standards. In Indonesia, we can easily find settlements that are not or less feasible. One of these settlements are settlements Bandarjo, which has a shape that is quite messy and dirty. Through these conditions we can observe about the availability of facilities and infrastructure based on standards that use Infrastructures Ministry Regulation No. 534/2001 about the minimum service standards and also use occupant perceptions. Based on this it can be determined whether the infrastructure (roads, drainage, sanitation, clean water and waste) and facilities (education, health, trade, social cultural and open space) in settlements Bandarjo have adequate or not. To achieve the desired goal, the steps being taken in this research is the analysis of socio-economic characteristics, the analysis based on the availability of infrastructure facilities, standards and analysis based on the perception of the occupants. The method used in this research is the field observations, questionnaires, and document review. Information obtained from this study is that the level of availability of infrastructure facilities in the district that have adequate Bandarjo except waste and green open spaces.

Keywords: Settlement, Infrastructure

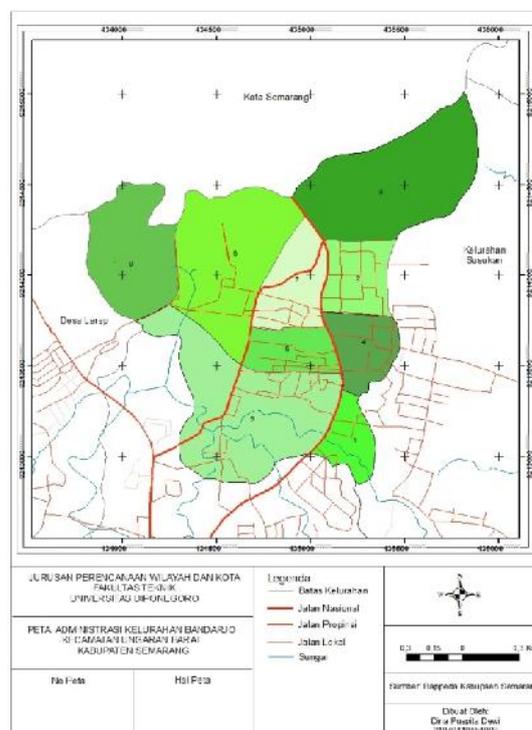
PENDAHULUAN

Perkembangan kota meningkatkan aktivitas didalamnya. Untuk mengakomodasi aktivitas, diperlukan hunian sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut, biasanya diwujudkan dalam bentuk perumahan dan permukiman oleh pemerintah. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, berbanding lurus dengan permintaan akan kebutuhan tempat tinggal. Seiring dengan bertambahnya penduduk maka perumahan dan permukimanpun bertambah dengan cepat. Dalam pembangunan tersebut, perlu diperhatikan kebersihan, keamanan, keindahan serta kenyamanan bagi penghuninya. Untuk mencapai hal itu, maka dibutuhkan sarana dan prasarana. Pemerintah dalam melakukan pembangunan permukiman telah memberikan peraturan dan pedoman mengenai pemenuhan sarana dan prasarana dengan standar pelayanan minimal, sehingga setidaknya masyarakat penghuni dapat tinggal dengan nyaman dan melakukan aktivitasnya dengan baik.

Ungaran merupakan Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Semarang, dan permintaan akan hunianpun terus meningkat. Meningkatnya permintaan perumahan dan pemukiman tentu merupakan pertanda baik bagi perkembangan kota Ungaran, akan tetapi dalam pembangunannya tidak semua perumahan dan permukiman memiliki kelayakan sama. Kelayakan akan prasarana lingkungan yang kurang memadai, menjadi gambaran bagi beberapa wilayah yang ada di Ungaran

Salah satu titik permukiman yang mencerminkan pertumbuhan tinggi tanpa dibarengi sarana dan prasarana yang berkualitas adalah permukiman yang terletak di Kelurahan Bandarjo. Dampak dari belum terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana di permukiman tersebut dapat terlihat dari beberapa wilayah yang terlihat kurang bersih dan sampah masih dibuang di sungai, sehingga lingkunganpun terlihat kotor dan berpotensi dapat menurunkan kesehatan masyarakatnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai “Evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman Di Kelurahan Bandarjo Kabupaten Semarang.” Wilayah administrasi Kelurahan Bandarjo dapat dilihat pada peta dibawah ini.



Gambar 1
Peta Administrasi Kelurahan Bandarjo

TINJAUAN STUDI

Pembangunan dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal digunakan untuk mendukung penyediaan permukiman, pangan, aksesibilitas dan jaminan peruntukan ruang merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun peraturan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 534/KPTS/M/2001, untuk kemudian didukung kelengkapannya dengan menggunakan peraturan lain yaitu SNI 03-7013-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Ketentuann secara lengkap mengenai penyediaan sarana permukiman di perkotaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I
Ketentuan Standar Pelayanan Minimal Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketentuan	Sumber
1	Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan lingkungan, ketentuan panjang 40-60m/Ha dengan lebar 2-5 m. - Jalan setapak, ketentuan panjang 50-110m/Ha dengan lebar 0,8-2m - Aksesibilitas mudah ke setiap wilayah - Fisik jalan telah dilakukan pengaspalan/pavingisasi 	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001
2	Air limbah / sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Setidaknya 80% dari jumlah penduduk telah memiliki sarana sanitasi individual komunal seperti toilet/MCK dan septik tank. - Terdapat separasi antara mandi, cuci dan kakus 	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001
3	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah yang tidak ada genangan banjir >10Ha. Jika ada genangan, maka tinggi genangan <30cm, dengan lama genangan <2jam. - Terdapat drainase selokan - Drainase mampu menampung air 	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001
4.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Setidaknya 80% dari jumlah penduduk dilayani oleh sistem DK/PDK dan sisanya dapat ditangani secara saniter (onsite system). Adapun prioritas penanganan sistem persampahan adalah 100% untuk kawasan pusat kota dan pasar, 100% jiwa/kawasan permukiman dengan kepadatan >100 jiwa/ha rata-rata 80% untuk kawasan permukiman perkotaan. - Tidak ada pembuangan sampah secara liar 	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001
5.	Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk yang terlayani 55-75% - Debet air mencukupi dengan kebutuhan air 60-220 lt/org/hari - Memenuhi standar air bersih yaitu tidak berwarna, berbau dan berasa. 	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001
6.	Niaga	<ul style="list-style-type: none"> - Setidaknya di setiap kecamatan tersedia 1 pasar untuk setiap 30.000 penduduk dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Selain itu pasar tersebut juga mudah diakses - Terdapat toko/warung dengan pelayanan 250 jiwa/unit. - Aksesibilitas menuju sarana niaga/perdagangan mudah 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 - SNI 03-7013-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
7	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal tersedia TK, SD, SMP, dan SMU. Fasilitas ini disediakan di tengah-tengah lingkungan permukiman dengan kriteria antara lain bersih, mudah dicapai, tidak bising, jauh dari sumber penyakit, sumber bau sampah dan pencemaran lainnya. - TK melayani 1.250 jiwa/unit, SD 1.600 jiwa/unit, SMP dan SMK/SMA melayani 4.800 jiwa/unit 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 - SNI 03-7013-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
8	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jangkauan wilayah kabupaten/kota minimal tersedia 1 unit balai pengobatan/3.000 jiwa - Aksesibilitas mudah - Tempat tenang, bersih dan jauh dari sumber penyakit - Posyandu minimal melayani 1.250 jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 - SNI 03-7013-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
9	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan wilayah kabupaten/kota setidaknya tersedia taman lingkungan untuk setiap 250 jiwa, taman kecamatan untuk setiap 120.000 jiwa, taman lingkungan (RW) untuk setiap 2.500 jiwa - Taman yang tersedia bersih, nyaman dan terawat 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 - SNI 03-7013-2004 Tentang

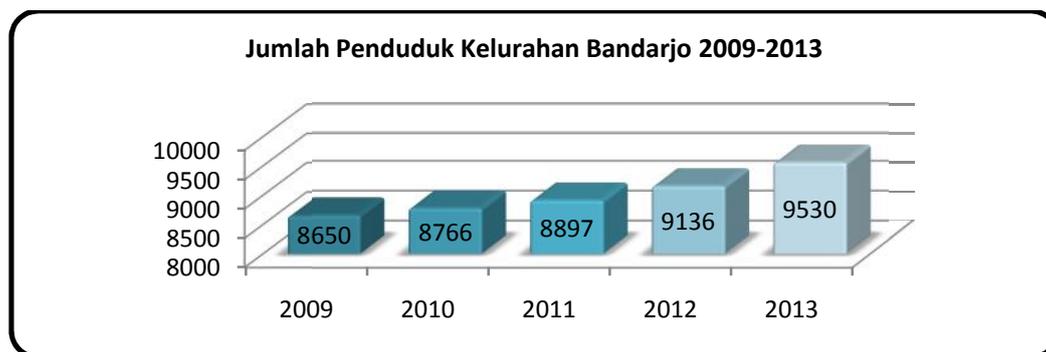
No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketentuan	Sumber
		- Aksesibilitas mudah	Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
10	Sosial budaya	- Cakupan kabupaten/kota setidaknya tersedia 1 unit tempat ibadah/2.500 jiwa - Tempat ibadah yang ada bersih, nyaman dan teduh - Aksesibilitas mudah	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001

Berdasarkan standar dari pemerintah tersebut maka kemudian dapat ditentukan parameter apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah sarana prasarana yang ada di permukiman Kelurahan Bandarjo sudah memadai atau belum.

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PENDUDUK DI KELURAHAN BANDARJO

Sebelum dijelaskan mengenai identifikasi sosial penduduk, maka terlebih dahulu akan dipaparkan jumlah penduduk di Kelurahan Bandarjo dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 2009-2013. Jika

dicermati maka jumlah penduduk di Kelurahan Bandarjo dari tahun ketahun mengalami peningkatan secara *significant*. Pada tahun 2009 jumlah penduduk di Kelurahan Bandarjo sebesar 8.650. Kemudian pada tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 8.766 sehingga kenaikannya sebanyak 116 orang. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan kembali sebesar 131 orang, sehingga jumlah penduduknya berjumlah 8.897. Tren kenaikan berlanjut ditahun 2012 sebesar 239 orang sehingga jumlah keseluruhan menjadi 9.136. Pada tahun terbaru 2013 kenaikan penduduk menjadi 357 orang. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Kecamatan Ungaran Barat Dalam Angka, 2013

Gambar 2

Diagram Perbandingan Jumlah Penduduk Kelurahan Bandarjo Tahun 2009-2013

• **Karakteristik sosial**

Karakteristik sosial masyarakat di Kelurahan Bandarjo yang akan dibahas disini adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ni mencakup masyarakat yang tidak atau belum bersekolah, belum tamat SD, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, tamat Akademi/Diploma dan Sarjana keatas. Berikut statistik jumlah penduduk berdasarkan pendidikan menurut umur 5 tahun keatas tahun 2013

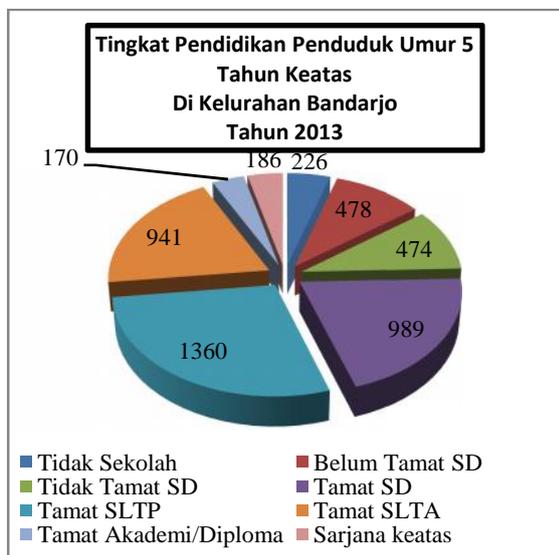
Jumlah masyarakat yang tidak atau belum bersekolah sejumlah 516 orang, belum tamat SD 1.346 orang, tidak tamat SD Teknik PWK; Vol. 3; No. 4; 2014; hal. 738-747

berjumlah 794 orang, tamat SD 1.921 orang, tamat SLTP 2.325 orang, tamat SLTA 1.667 orang, tamat Akademi/Diploma 335 orang dan Sarjana keatas 589 orang.

Penduduk terbesar yang ada di Kelurahan Bandarjo memiliki tingkat pendidikan SLTP yaitu sebesar 2.325 orang, disusul tamat SD 1.921 orang kemudian SLTA 1.667 orang dan yang paling sedikit adalah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan Akademi atau Diploma yaitu sebesar 335 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Bandarjo

tergolong cukup tinggi melihat bahwa masyarakat yang dapat menempuh wajib belajar sampai dengan 12 tahun cukup banyak. Akan tetapi perlu juga dicermati bahwa masyarakat yang putus sekolah juga tidak sedikit yaitu tidak lulus SD berjumlah 794 orang.



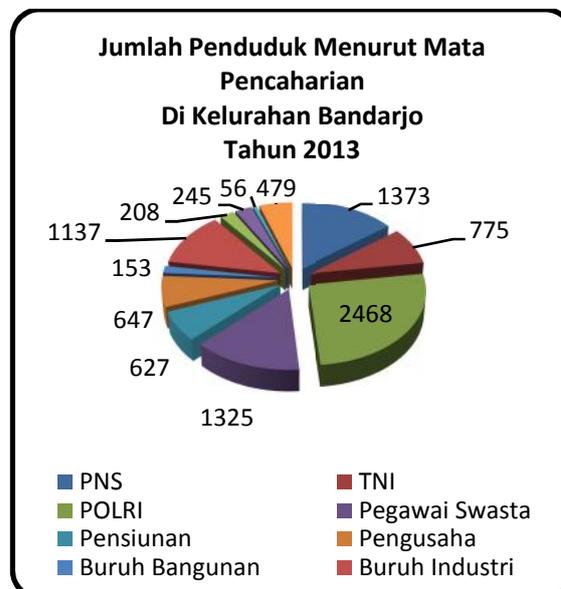
Sumber: Kecamatan Ungaran Barat Dalam Angka, 2013

Gambar 3
Diagram Tingkat Pendidikan Penduduk Umur 5 Tahun Keatas Kelurahan Bandarjo Tahun 2013

- Mata pencaharian penduduk
Mata pencaharian penduduk Kelurahan Bandarjo digolongkan menjadi 12 jenis yaitu PNS, TNI, POLRI, pegawai swasta, pensiunan, pengusaha, buruh bangunan, buruh industri, buruh tani, petani, peternak dan pekerja lain-lain.

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Bandarjo yaitu jumlah penduduk yang bermata pencaharian PNS sebanyak 1.373 orang, TNI sebanyak 775 orang, POLRI sebanyak 2.468 orang, pegawai swasta berjumlah 1.325 orang, pensiunan berjumlah 627 orang, pengusaha sebanyak 647 orang, buruh bangunan sebanyak 153 orang, buruh industri sebanyak 1.137 orang, buruh tani berjumlah 208 orang, petani berjumlah 245 orang, peternak sejumlah 56 orang dan pekerja lain-lain sejumlah 479 orang.

Profesi terbesar penduduk di Kelurahan Bandarjo adalah profesi POLRI sebanyak 2.468, kemudian diikuti PNS 1.373 orang dan pegawai swasta 1.325 orang. Sedangkan jenis profesi atau mata pencaharian terkecil adalah peternak 56 orang.



Sumber: Monografi Kelurahan Bandarjo, 2013

Gambar 4
Diagram Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kelurahan Bandarjo Tahun 2013

- **Tingkat penghasilan dan pengeluaran penduduk**

Tingkat penghasilan penduduk sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui secara lebih detail tingkat kesejahteraan seseorang. Tingkat penghasilan ini didapatkan melalui survei primer melalui kuisioner yang disebar kepada masyarakat yang menjadi sampel di Kelurahan Bandarjo. Adapun jumlah sampel atau responden yang digunakan adalah berjumlah 94 orang

Tabel II
Pendapatan Perbulan Responden di Permukiman Kelurahan Bandarjo

Pendapatan	Frekuensi	Persen (%)
< 1 jt	16	17,02
1-3 jt	52	55,32
> 3 jt	26	27,66

Pendapatan	Frekuensi	Persen (%)
< 1 jt	16	17,02
1-3 jt	52	55,32
> 3 jt	26	27,66
Total	94	100.0

Sumber: Survei Lapangan, 2014

Tabel III
Tingkat Pengeluaran Perbulan Responden Di Permukiman Kelurahan Bandarjo

Pengeluaran	Frekuensi	Persen (%)
< 1 jt	33	35,11
1-3 jt	49	52,13
> 3jt	12	12,77
Total	94	100.0

Sumber: Survei Lapangan, 2014

• **Kepemilikan Rumah Di Kelurahan Bandarjo**

Pada survei status kepemilikan rumah disini menggunakan kriteria status rumah milik sendiri, sewa dan milik orang tua.

Indikator kesejahteraan tertinggi berada pada kriteria milik sendiri.

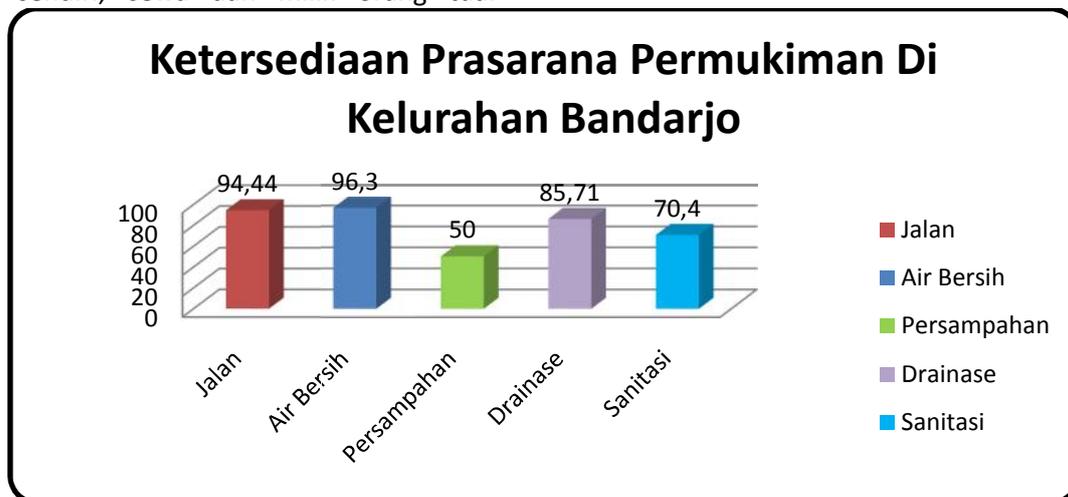
Tabel IV
Kepemilikan Rumah Oleh Responden Di Permukiman Kelurahan Bandarjo

Status Kepemilikan Rumah	Frekuensi	Persen (%)
Milik Sendiri	56	58.9
Sewa	17	17.9
Milik Orang tua	22	23.2
Total	95	100.0

Sumber: Survei Lapangan, 2014

2. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Standar

Analisis dan observasi ketersediaan prasarana permukiman di Kelurahan Bandarjo ini dilakukan berdasarkan pembagian RW. Hal ini dikarenakan setiap wilayah RW memiliki prasarana yang berbeda-beda dan diharapkan hasil yang diperoleh lebih mencerminkan keadaan lapangan. Hasil analisis ini dapat dilihat secara lengkap pada gambar berikut.



Gambar 5
Diagram Ketersediaan Prasarana Permukiman Di Kelurahan Bandarjo

Berdasarkan analisis prasarana diatas maka dapat diketahui tingkat ketersediaan prasarana yang ada di permukiman Kelurahan Bandarjo yang sudah memadai ada pada jalan dengan presentase 94,44%, air bersih dengan presentase 96,30% drainase dengan presentase 85,71% dan sanitasi dengan presentase 70,40%. Kriteria tidak memadai ada prasarana persampahan dengan presentase 50%.

Pada prasarana persampahan berkategori tidak memadai, karena masih ada beberapa masyarakat terutama yang tinggal di pinggir sungai membuang sampahnya secara sembarangan. Selain itu, di lingkungan Kelurahan Bandarjo belum memberlakukan pemisahan atau separasi sampah organik dan nonorganik.

Analisis dan observasi pada ketersediaan sarana, dilakukan secara general

pada satu kelurahan tanpa membedakan wilayah RW. Hal ini dikarenakan, sarana dibangun tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam lingkup RW tetapi untuk lingkup wilayah yang lebih luas.

Adapun hasil yang didapatkan dari observasi sarana berdasarkan standar adalah dari kelima sarana yang ada hanya sarana ruang terbuka hijau saja yang belum memadai sedangkan sarana yang lainnya yaitu sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana niaga atau perdagangan dan sarana sosial budaya sudah memadai.

Sarana ruang terbuka hijau berkategori tidak memadai dikarenakan taman lingkungan yang ada masih kurang kebutuhannya. Di Kelurahan Bandarjo taman lingkungan hanya berjumlah 10 unit saja

sedangkan standar minimal dari ketersediaan taman lingkungan adalah 1 unit untuk melayani 250 jiwa sehingga diperlukan taman lingkungan sejumlah 38 unit. Selain itu, dari 10 unit taman lingkungan yang ada, keadaan 4 unit diantaranya kurang terawat dan bersih.

Secara lebih rinci dijelaskan bahwa sarana dengan presentase pemenuhan tertinggi berada pada sarana sosial budaya (rumah ibadah) dan sarana perdagangan atau niaga yaitu sebesar 100%. Skala presentase pemenuhan terbesar selanjutnya pada ketersediaan sarana di Kelurahan Bandarjo adalah sarana kesehatan sebesar 83,33%, kemudian sarana pendidikan sebesar 81,25% dan sarana ruang terbuka hijau sebesar 33,33%.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 6

Diagram Ketersediaan Sarana Permukiman Di Kelurahan Bandarjo

3. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Persepsi Penghuni

• Jalan

Persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa kondisi jalan di permukiman Bandarjo Kabupaten Semarang dimana persepsi yang termasuk memadai sebanyak 4 responden (4,25%), persepsi cukup memadai sebanyak 81 responden (86,17%), persepsi responden tidak memadai sebanyak 9 responden (9,57%), dan responden dengan persepsi sangat tidak memadai sebanyak 0 orang (0%).

Berdasarkan persepsi masyarakat penghuni dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat telah menganggap jalan lingkungan di Kelurahan Bandarjo sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari jalan yang sudah aspal atau paving, memiliki lebar yang cukup serta aksesibilitas menuju tempat lain tergolong mudah. Namun, beberapa masyarakat di wilayah tertentu menganggap sejumlah jalan kualitasnya kurang bagus dikarenakan ditempat mereka masih banyak ditemukan jalan berlubang yang dapat

meningkatkan resiko kecelakaan dan mengurangi kenyamanan pengendara.

- **Air Bersih**

Persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa air bersih dengan kategori sangat sesuai sebanyak 83 responden (88,3%), persepsi sesuai sebanyak 11 responden (11,7%), persepsi tidak sesuai sebanyak 0 responden (0%), dan persepsi sangat tidak sesuai sebanyak 0 responden (0%). Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa air bersih di permukiman Kelurahan Bandarjo telah memadai.

- **Persampahan**

persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa persampahan dengan kategori sangat sesuai sebanyak 1 responden (1,06%), persepsi sesuai sebanyak 41 responden (43,62%), persepsi tidak sesuai sebanyak 45 responden (47,87%), dan persepsi sangat tidak sesuai sebanyak 7 responden (7,45%). Dari deskripsi diatas dapat diketahui bahwa prasarana persampahan menurut masyarakat penghuni tidak memadai

- **Drainase**

Persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa drainase dengan kategori sangat sesuai sebanyak 81 responden (86,17%), persepsi sesuai sebanyak 8 responden (8,51%), persepsi tidak sesuai sebanyak 4 responden (4,26%), dan persepsi sangat tidak sesuai sebanyak 1 responden (1,06%). Dengan demikian dapat disimpulkan drainase permukiman di Kelurahan Bandarjo berdasarkan persepsi masyarakat sudah berkategori memadai karena sebanyak 81 responden mengatakan drainase sangat sesuai atau memadai.

- **Sanitasi**

Persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa sanitasi dengan kategori sangat sesuai sebanyak 71 responden (75,53%), persepsi sesuai sebanyak 20 responden (21,27%), persepsi tidak sesuai sebanyak 1 responden (1,06%), dan persepsi sangat tidak sesuai sebanyak 2 responden (2,12%). Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan persepsi

masyarakat sanitasi di permukiman Kelurahan Bandarjo sudah memadai.

- **Sarana Pendidikan**

Persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa sarana kesehatan dengan kategori sangat sesuai sebanyak 19 responden (20,21%), persepsi sesuai sebanyak 74 responden (78,72%), persepsi tidak sesuai sebanyak 1 responden (1,06%), dan persepsi sangat tidak sesuai sebanyak 0 responden (0%). Dapat disimpulkan pada sarana pendidikan sudah memadai.

- **Sarana Niaga**

Persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa sarana niaga dengan kategori sangat sesuai sebanyak 81 responden (86,17%), persepsi sesuai sebanyak 13 responden (13,83%), persepsi tidak sesuai sebanyak 0 responden (0%), dan persepsi sangat tidak sesuai sebanyak 0 responden (0%).

- **Sarana Terbuka Hijau**

Persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa sarana ruang terbuka hijau dengan kategori sangat sesuai sebanyak 0 responden (0%), persepsi sesuai sebanyak 45 responden (47,87%), persepsi tidak sesuai sebanyak 49 responden (52,18%), dan persepsi sangat tidak sesuai sebanyak 0 responden (0%). Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui sarana ruang terbuka hijau di permukiman Kelurahan Bandarjo adalah tidak memadai.

- **Sarana Sosial Budaya**

Persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa sarana niaga dengan kategori sangat sesuai sebanyak 80 responden (85,11%), persepsi sesuai sebanyak 14 responden (14,89%), persepsi tidak sesuai sebanyak 0 responden (0%), dan persepsi sangat tidak sesuai sebanyak 0 responden (0%). Dapat disimpulkan sarana sosial budaya sudah memenuhi.

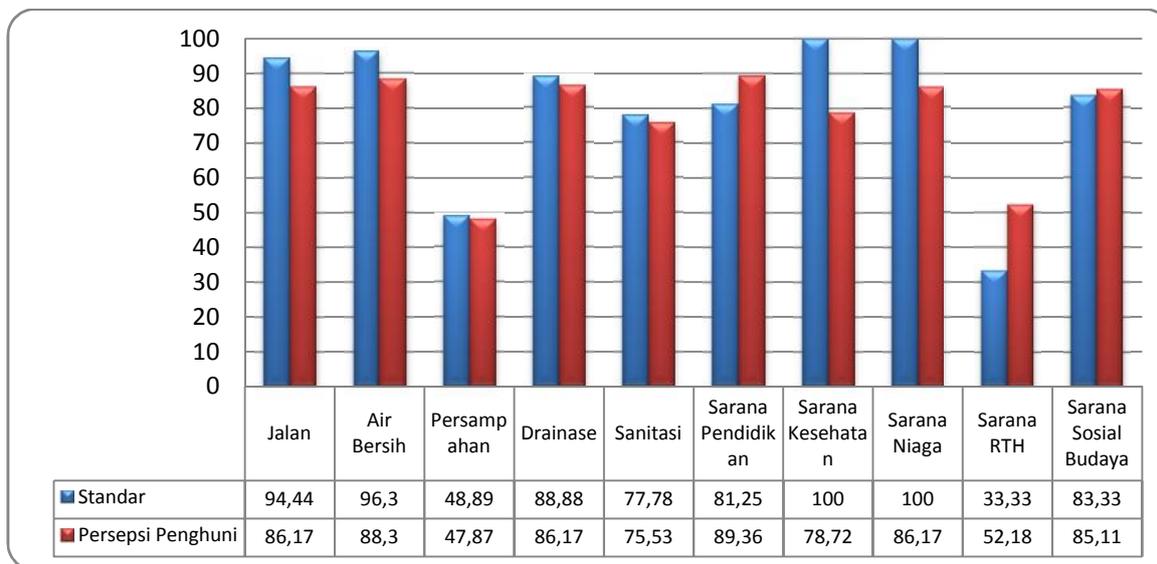
- **Sarana Kesehatan**

Persepsi responden terhadap ketersediaan sarana prasarana berupa sarana kesehatan dengan kategori sangat sesuai sebanyak 19 responden (20,21%), persepsi sesuai sebanyak 74 responden (78,72%), persepsi tidak sesuai sebanyak 1 responden

(1,06%), dan persepsi sangat tidak sesuai sebanyak 0 responden (0%). Dapat disimpulkan sarana kesehatan di Kelurahan Bandarjo telah memadai.

Kesimpulan Sarana dan Prasarana Permukiman Di Kelurahan Bandarjo

Setelah didapatkan dan diketahui bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana permukiman di Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang berdasarkan standar dan berdasarkan persepsi penghuni. Perbandingan secara detail dapat dilihat pada tabel IV.19 dan diagram dibawah ini.



Gambar 7
Perbandingan Sarana Prasarana Di Permukiman Bandarjo Berdasarkan Standar Dan Persepsi Penghuni

Berdasarkan perbandingan tersebut sarana yang tidak memadai hanya prasarana persampahan dengan sarana ruang terbuka hijau. Kedua-duanya baik berdasarkan standar ataupun persepsi penghuni memiliki kriteria yang sama.

Sedangkan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana niaga, dan sarana sosial budaya mencakup kriteria memadai dan cukup memadai. Dengan perbandingan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar fasilitas yang terdapat di Kelurahan Bandarjo sudah memenuhi.

Kesimpulan

Pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan permukiman Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dapat ditinjau berdasarkan peraturan normatif dan persepsi masyarakat. Melalui peraturan dapat diketahui standar

minimal yang seharusnya digunakan dan melalui persepsi masyarakat dapat diketahui secara langsung di lapangan mengenai kualitas sarana dan prasarana lingkungan.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana prasarana permukiman di Kelurahan Bandarjo Kabupaten Semarang sudah memadai. Prasarana yang sudah memadai tersebut antara lain jalan, air bersih, drainase, dan sanitasi sedangkan sarana yang sudah memadai antara lain sarana pendidikan, kesehatan, niaga atau perdagangan dan sosial budaya. Sarana dan prasarana yang belum memadai baik menurut persepsi masyarakat ataupun standar adalah sarana ruang terbuka hijau dan prasarana persampahan.

Selain kesimpulan diatas, juga terdapat temuan studi pada penelitian ini yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yaitu:

1. Masyarakat Kelurahan Bandarjo memiliki kesadaran akan kebersihan yang cenderung rendah. Hal ini dikarenakan hampir semua masyarakat punya tempat sampah pribadi dirumah akan tetapi sebagian besar masyarakat terutama yang berada di RW 5 dan RW 9 yang berada di sepanjang sungai lebih memilih
3. mengalami sedikit genangan jika terjadi hujan deras

- membuang sampah di aliran sungai daripada TPS RW.
2. Sebagian masyarakat di Kelurahan Bandarjo yang tinggal didekat/sepanjang sungai rata-rata tidak memiliki drainase, terutama di RW 9. Hal ini menyebabkan wilayah yang berada di daerah cekungan

Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.
Jakarta: BSN

Kementerian Permukiman Dan Prasarana Wilayah. 2001. *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001.* Jakarta.

Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.* Jakarta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta..

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. *Kecamatan Ungaran Barat Dalam Angka.* Kabupaten Semarang: Badan Pusat Statistik.
- Anonim. 2013. *Monografi Kelurahan Bandarjo.* Ungaran: Kantor Kelurahan Bandarjo.
- Badan Standarisasi Nasional. 2004. *Standar Nasional Indonesia Nomor 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan*